



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

# RENCANA STRATEGIS

**RENSTRA**  
TAHUN 2025 - 2029



**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman strategis bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi kami dalam mendukung tercapainya visi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk yang terencana, serta penguatan ketahanan keluarga. Renstra ini disusun secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, Rencana Strategis Nasional, serta prioritas pembangunan kesehatan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik di tingkat pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan sasaran dan program prioritas yang telah dirumuskan dalam dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas, pengendalian penduduk yang optimal, serta keluarga yang sejahtera dan berdaya saing.

Tarempa, 15 September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA



YESSY ARIESSANDY, S.Farm, Apt., M.H.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19810418 200604 2 019



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>	
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....</b>	<b>2</b>	
<b>BAB I</b>		
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>	
1.1 Latar Belakang.....	4	
1.2 Landasan Hukum .....	7	
1.3 Maksud dan Tujuan .....	13	
1.4 Sistematika Penulisan.....	15	
<b>BAB II</b>		
<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>17</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	17	
2.2 Sumber Daya Aparatur .....	19	
2.3 Kinerja Pelayanan.....	23	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	31	
2.5 Permasalahan dan Isu-isu Strategis .....	45	
2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	46	
2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	49	
2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	50	
2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	53	
2.10 Penentuan Isu-isu Strategis.....	57	
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>		<b>60</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran .....	60	
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	63	
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>		<b>66</b>
4.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	66	
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	171	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>179</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan .....	20
Tabel 2. 2	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	21
Tabel 2. 3	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin .....	21
Tabel 2. 4	
Sarana dan Prasarana Pendukung.....	23
Tabel 2. 5	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	
Kabupaten Kepulauan Anambas .....	25
Tabel 2. 6	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	29
Tabel 2. 7	
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	
Pembangunan Daerah .....	48
Tabel 3. 1	
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah .....	61
Tabel 3. 2	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	64
Tabel 4. 1	
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	69
Tabel 4.2	
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dan mendukung Program Prioritas	
Pembangunan	
Daerah.....	169
Tabel 4. 3	
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran .....	171
Tabel 4. 4	
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat daerah .....	173
Gambar 2. 1	
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Kabupaten Kepulauan Anambas .....	19



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu, sehingga dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini menjadi investasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Tujuan ini sejalan dengan implementasi hak kesehatan yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) dalam perubahan kedua dan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Setiap upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan melalui upaya kesehatan perorangan dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang diselenggarakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan adalah melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian, dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.



Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Paradigma perencanaan pembangunan saat ini mengharuskan pendekatan perencanaan yang memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. Dengan demikian, perencanaan daerah diharapkan tidak hanya memenuhi kaidah-kaidah sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa kepemilikan rencana (*sense of ownership*) di kalangan masyarakat.

Keterlibatan *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa rencana yang disusun mendapat dukungan optimal dalam pengimplementasiannya. Berdasarkan hal tersebut, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, juga mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen-dokumen tersebut disusun dengan melibatkan masyarakat sebagai *stakeholders*, dan sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen harus saling terhubung dan konsisten. RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD harus dapat mengatasi permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis jangka panjang dan menengah, terutama terkait dengan standar pelayanan. Renstra PD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan yang diterjemahkan dalam Renstra PD dan



Renja PD. Renstra PD dan Renja PD diharapkan dapat menjadi dasar perumusan dan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) harus mencerminkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para *stakeholders* pembangunan daerah. Hal ini juga bertujuan untuk menjadi jembatan dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan beberapa parameter yang dapat menjadi indikasi bagaimana strategi-strategi tersebut dapat menghasilkan nilai (*strategic objective*). Selanjutnya, parameter-parameter tersebut harus diterjemahkan lebih lanjut dengan menggunakan data, metodologi tertentu, asumsi-asumsi, analisis, serta membangun kerangka berpikir ilmiah dan sistematis sebagai pendekatan perencanaan teknokratis. Hal ini akan dituangkan dalam indikator-indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah yang disepakati bersama, bersama dengan indikasi pembiayaan yang diperlukan.

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029 dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen-dokumen ini mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Dalam konteks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan komponen penting dalam tata kelola manajemen organisasi, yang menjadi



dasar dalam perumusan serta penilaian kinerja perangkat daerah secara terintegrasi.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan berlandaskan hukum-hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
  9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6442);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);
  15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
  18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);



21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan



Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil



- Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  39. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  41. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
  43. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 105 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105);



44. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024).
47. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
48. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk menerjemahkan dan mempertajam visi dan misionaris serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan dan program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan



Anambas Tahun 2025-2029 dengan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

**b. Tujuan**

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan arah kebijakan strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai dengan isu-isu strategis di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan pembangunan kesehatan jangka menengah dan pendek Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta unit perangkat teknisnya.
3. Memastikan keterpaduan antara Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan kebijakan pembangunan nasional.
4. Menyediakan dasar perencanaan yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diukur melalui indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*).
5. Membangun sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai stabilitas politik, harmoni sosial, dan penguatan persatuan bangsa.
6. Mengadaptasi rencana kerja organisasi dengan perkembangan kondisi lokal, nasional, dan global untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.



7. Melaksanakan pembagian tugas dan kewenangan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tingkat Kabupaten, dan Kecamatan berdasarkan prinsip keadilan dan akuntabel.
8. Menjadi parameter dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan pada setiap siklus perencanaan pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan. Identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, telaah dan rumusan isu – isu strategis.



**BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH  
KEBIJAKAN**

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi, strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan serta indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB V PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pasal 3 menyatakan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki fungsi-fungsi tertentu, yaitu :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik daerah;



6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

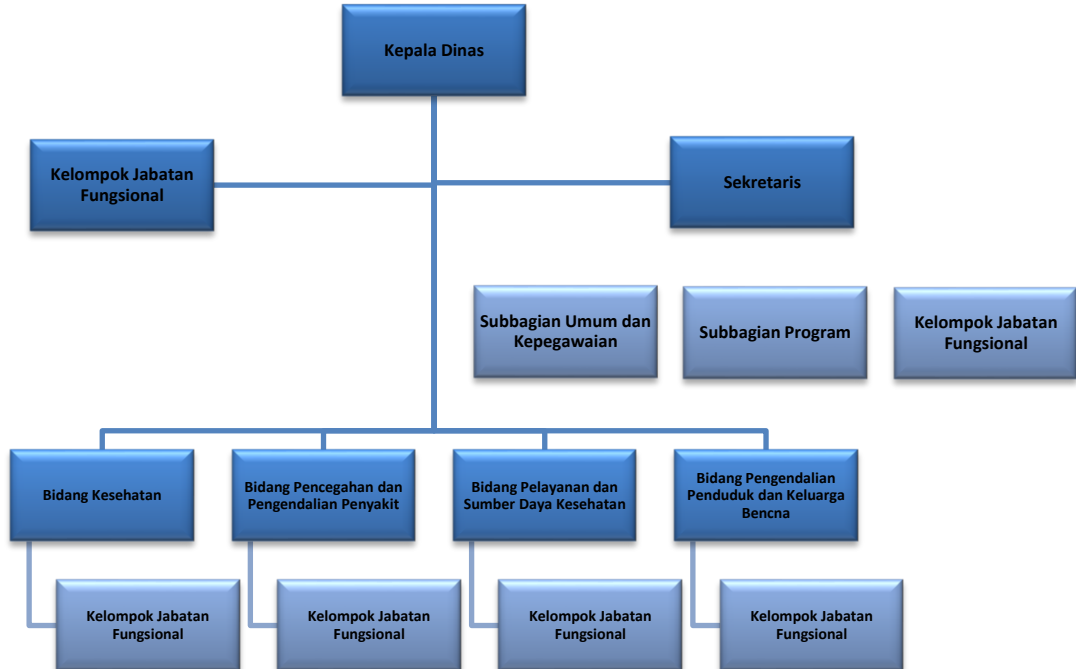
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Program; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, membawahi :
  - Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**



Sumber data : Sekretariat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024

## 2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Per Januari 2025 berjumlah 626 (enam ratus dua puluh enam) Orang terdiri dari 127 Aparatur Sipil Negara dan 499 Pegawai Tidak Tetap. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut:

### a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Aparatur**  
**Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan**

No	Golongan	Jabatan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	Eselon II.a	1
2	Pembina	Eselon III.a	1
3	Pembina	Eselon III.b	3
4	Penata Tk. I	Eselon III.b	2
5	Penata Tk. I	Eselon IV.a	5
6	Penata	Eselon IV.a	4
7	Penata Muda Tk. I	Eselon IV.a	1
8	Pembina Tk. I	Fungsional	2
9	Pembina	Fungsional	11
10	Penata Tk. I	Fungsional	13
11	Penata	Fungsional	47
12	Penata Muda Tk. I	Fungsional	99
13	Penata Muda	Fungsional	35
14	Pengatur Tk. I	Fungsional	97
15	Pengatur	Fungsional	41
16	X	Fungsional	20
17	IX	Fungsional	45
18	VII	Fungsional	151
19	Pembina	Pelaksana	0
20	Penata Tk. I	Pelaksana	1
21	Penata	Pelaksana	8
22	Penata Muda Tk. I	Pelaksana	24
23	Penata Muda	Pelaksana	18
24	Pengatur Tk. I	Pelaksana	9
25	Pengatur	Pelaksana	21
26	Pengatur Muda Tk. I	Pelaksana	2
27	Juru Muda Tk. I	Pelaksana	1
28	IX	Pelaksana	45
29	V	Pelaksana	55
<b>Jumlah</b>			<b>762</b>

Sumber data : Sekretariat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB 2025

**b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan**

Adapun komposisi pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :



**Tabel 2.2**  
**Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	PNS : 446 Orang	S2 : 19
		S1 + PROFESI : 69
		S1 : 96
		D4 : 15
		D3 : 239
		SMA/SMK : 8
2	PPPK : 316 Orang	S2 : 1
		S1 + PROFESI : 24
		S1 : 74
		D4 : 11
		D3 : 151
		SMA/SMK : 55
<b>Jumlah</b>		<b>762 Orang</b>

Sumber data : Sekretariat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB 2025

**c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin**

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didominasi kaum Perempuan yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

**Tabel 2.3**  
**Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin**

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
PNS	115	331
PPPK	85	231
<b>Jumlah</b>	<b>200</b>	<b>562</b>

Sumber data : Sekretariat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB 2025

Sumber daya aparatur memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan Dinas Kesehatan, Pengendalian



Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagai motor penggerak utama, aparatur tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas, inovasi, dan semangat pelayanan yang tinggi. Dengan peran ini, mereka menjadi garda terdepan dalam menyampaikan layanan kesehatan yang berkualitas, melaksanakan program pengendalian penduduk yang efektif, serta memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Keberhasilan program dinas sangat bergantung pada kapasitas sumber daya aparatur dalam memahami kebutuhan masyarakat, merancang kebijakan yang responsif, dan melaksanakan program secara profesional. Selain itu, kolaborasi yang efektif, baik internal maupun dengan berbagai pihak eksternal, juga sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam membangun komunikasi dan kemitraan strategis. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan motivasi aparatur menjadi prioritas utama guna memastikan kinerja yang optimal dan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sarana pelayanan kesehatan merupakan unsur penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan, keberadaan baik secara kuantitas dan kualitas maupun dalam penyebarannya sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan sarana kesehatan mengikuti dinamika pertumbuhan penduduk sehingga dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Penyediaan sarana dan fasilitas yang sesuai standar



menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung**

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Tanah	92	2.752.322.250
2	Peralatan dan Mesin	6.577	173.790.770.523
3	Gedung dan Bangunan	237	174.575.082.626
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	44	17.691.054.349
5	Aset Tetap Lain	2	4.515.000
6	Konstruksi dan Pengerjaan	35	10.009.444.255

*Sumber data : Sekretariat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB 2025*

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana memiliki peran strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing. Kinerja pelayanan dinas ini berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta penguatan ketahanan keluarga. Dalam melaksanakan tugasnya, dinas senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Selama periode ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, mulai dari penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten, hingga pelaksanaan program-



program preventif dan promotif. Dalam bidang pengendalian penduduk, langkah-langkah strategis seperti edukasi keluarga berencana, peningkatan peran penyuluh, serta sinergi dengan mitra kerja terus diperkuat. Semua inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup yang lebih baik.

Pelayanan yang diberikan juga berfokus pada penguatan peran keluarga sebagai pilar utama masyarakat. Melalui program-program yang inovatif, seperti kampanye kesehatan keluarga, layanan konsultasi gizi, dan pendampingan kesehatan reproduksi, dinas berupaya memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan kesehatan dan kesejahteraan sebagai prioritas utama..

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu :



**Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Umur Harapan Hidup	-	-	-	67,21	67,6	67,8	67,99	68,19	67,41	67,73	68,1	68,37		99,70%	99,81%	99,56%	99,44%	
2	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup				10.3/1000 KH	10,2/1000 KH	10,1/1000 KH	10/1000 KH	10/1000 KH	11,4/1000 KH	12/1000 KH	10,4/1000 KH	8,1/1000 KH		90%	85%	97,10%	123%	
3	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	-	-	-	91,00%	91,00%	94,00%	96,00%	98,00%		90.6%	91,00%	96,66			99,50%	96,80%	99,30%	
4	Angka Annual Parasite Insidens (API)				0,31	0,28	0,28	0,25	0,25		0	0	0			100%	100%	100%	
5	Persentase masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan				95,56%	95,56%	97,47%	98,44%	98,44%		94.30%	100%	100%			98,60%	102%	102%	
6	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi				69,23%	69,23%	100,00%	100,00%	100,00%		69,23%	76,90%	100%			100%	76,90%	100%	
7	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan				25,00%	50,00%	73,00%	82,00%	100,00%		30.00%	65.00%	94%			60%	89%	114%	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

	Pendayagunaan SDM																	
8	Persentase Posyandu Aktif			65,00%	74,00%	78,00%	84,00%	88,00%		83,82%	100%	98,57%			113%	128%	112%	
9	Persentase Desa Siaga Aktif			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%	100%	100%			100%	100%	100%	
10	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)			55,73	58,73	60,22	61,73	63,22	57,74	N/A	61,36	N/A		96,50%	N/A	98,10%	N/A	
11	Persentase Kampung Kb yang dibina			25,00%	50,00%	70,00%	85,00%	100,00%		40,00%	100%	100%			80%	142%	117%	
12	Persentase pembinaan keluarga berencana yang dilaksanakan			76,00%	77,00%	78,00%	78,00%	79,00%		91,60%	100%	91%			119%	128%	116%	
13	Indeks Reformasi Birokrasi			C (50)	C (50)	CC (51,76)	CC (51,76)	BB (78)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
14	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)			C (50)	C (50)	CC (51,76)	CC (51,76)	BB (78)	C (62,56)	C (47,11)	CC(59,66)	CC(59,96)		125,10%	94%	115,20%	76,80%	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat			C (75)	C (75)	B (81)	B (81)	B (82)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	



Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026 merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah. Kinerja ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mengendalikan pertumbuhan penduduk, serta memperkuat ketahanan keluarga. Oleh karena itu, pencapaian kinerja tersebut tidak hanya menjadi indikator keberhasilan masa lalu tetapi juga landasan penting untuk merancang strategi dan kebijakan di masa depan.

Dalam kurun waktu 2021–2026, berbagai program telah dilaksanakan untuk menjawab tantangan kesehatan dan kependudukan di Kepulauan Anambas. Peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan infrastruktur fasilitas kesehatan, dan pelaksanaan program keluarga berencana yang responsif telah menjadi prioritas utama. Evaluasi terhadap pencapaian program ini memberikan gambaran tentang keberhasilan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan untuk menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Salah satu elemen penting dari evaluasi ini adalah kemampuan untuk mengukur dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Capaian seperti peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan cakupan layanan kesehatan primer menjadi indikator penting keberhasilan. Di sisi lain, tantangan seperti keterbatasan geografis dan sumber daya di wilayah kepulauan juga memberikan pelajaran berharga tentang perlunya pendekatan inovatif dalam memberikan layanan yang lebih merata dan efektif.

Evaluasi terhadap kinerja pelayanan juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan. Kerja sama yang solid diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program, terutama dalam pengendalian penduduk dan penguatan ketahanan



keluarga. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan pendekatan parsial. Hal ini menjadi dasar untuk mengembangkan strategi kolaboratif yang lebih baik ke depan.

Selain itu, pencapaian kinerja pada periode 2021–2026 memberikan arahan yang jelas dalam menghadapi tantangan baru, termasuk dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat, pergeseran demografi, dan kebutuhan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan. Dengan pemanfaatan data dan hasil evaluasi secara optimal, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masa depan.

Melalui refleksi atas pencapaian kinerja ini, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya menjadi alat untuk mengukur keberhasilan tetapi juga menjadi pendorong untuk inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, kinerja pelayanan di masa depan dapat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu:

**Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kepulauan Anambas**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	89.829.461.715	93.171.236.747	106.302.205.993	117.074.190.412	82.542.616.408	90.207.614.131	98.570.033.983	98.465.891.483	92%	97%	93%	84%	9%	-9%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	86.581.037.005	70.577.907.576	82.221.619.623	36.280.590.738	45.951.526.546	57.083.216.699	74.303.494.336	32.428.758.673	53%	81%	90%	89%	-19%	-22%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	195.863.341	828.349.428	552.764.200	0	58.279.246	586.527.255	440.209.771	0	30%	71%	80%	145%	-66%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	699.368.610	0	0	310.845.920	212.420.706	0	0	203.620.046	30%	0	0	66%	-56%	-52%
Program Pemberdayaan	0	436.796.775	198.939.700	113.430.000	0	270.960.500	178.291.100	98.970.500	0	62%	90%	87%	-49%	-20%

Masyarakat Bidang Kesehatan														
Program Pengendalian Penduduk	0	0	141.800.000	132.000.000	0	0	132.740.000	125.037.000	0	0	94 %	95 %	-7%	-6%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.916.533.000	1.837.922.164	1.316.218.000	1.671.548.000	210.422.800	1.458.378.936	1.082.620.580	1.398.179.490	11 %	79 %	82 %	84 %	-5%	-36%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	0	24.960.400	755.004.000	427.680.000	0	18.975.875	746.081.900	403.680.000	0	76 %	99 %	94 %	1441%	-10%

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **1. Tantangan**

Tantangan dan peluang dalam pembangunan kesehatan disusun berdasarkan hasil pencapaian kinerja program dan kegiatan di bidang kesehatan, kondisi lingkungan strategis, serta perkembangan terbaru yang relevan dengan sektor kesehatan. Kedua faktor ini akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana beserta jajarannya.

Tantangan dalam pembangunan kesehatan dianalisis dengan memperhatikan unsur-unsur penting yang berpotensi menjadi hambatan, sekaligus memberikan perspektif bagi perangkat daerah untuk mengembangkan pelayanan yang berorientasi pada masa depan. Analisis tantangan ini dibagi dalam empat kategori utama yang merepresentasikan fokus utama dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di masa mendatang. Kategori ini mencakup pertimbangan terhadap kapasitas lingkungan internal dan eksternal, kebijakan kesehatan yang berlaku, serta permasalahan kesehatan aktual yang sedang dihadapi.

Hal ini berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar terdapat sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan di identifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi Internal

Identifikasi tantangan kondisi internal dalam pengembangan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya. Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau dengan akses terbatas, serta kondisi sosial dan ekonomi yang khas, memberikan tantangan tersendiri bagi pengembangan dan optimalisasi pelayanan di bidang kesehatan dan keluarga berencana. Berikut adalah beberapa tantangan internal yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pengembangan sektor-sektor tersebut:

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan.

Salah satu tantangan terbesar di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang memadai. Banyak pulau yang memiliki fasilitas kesehatan terbatas, dengan beberapa di antaranya hanya memiliki puskesmas atau posyandu sebagai layanan utama. Rumah sakit yang lengkap dan fasilitas medis lainnya seringkali terpusat di ibu kota kabupaten atau provinsi, sementara pulau-pulau kecil kesulitan dalam memperoleh akses yang cepat dan memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal, terutama dalam menangani kasus-kasus yang membutuhkan perawatan lanjutan atau spesialistik.

## 2. Kesulitan dalam Aksesibilitas dan Transportasi.

Jarak yang jauh antar pulau, ditambah dengan kondisi transportasi yang terbatas, menjadi tantangan signifikan dalam distribusi layanan kesehatan. Akses yang lambat dan tidak teratur ke fasilitas kesehatan dapat memperburuk kondisi pasien yang memerlukan pertolongan segera. Transportasi laut atau udara yang terganggu, terutama pada musim cuaca buruk, semakin membatasi pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Selain itu, distribusi obat dan alat medis juga menjadi lebih sulit dan memerlukan perencanaan yang lebih matang.

## 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya, menjadi tantangan besar di daerah kepulauan. Banyak tenaga kesehatan enggan bertugas di daerah terpencil karena faktor jarak, kondisi lingkungan, dan keterbatasan fasilitas. Akibatnya, kekurangan tenaga medis di berbagai fasilitas kesehatan seringkali menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi tenaga yang ada, dan dapat memengaruhi kualitas pelayanan. Selain itu, kebutuhan akan tenaga medis dengan keahlian khusus untuk menangani kondisi-kondisi tertentu juga lebih sulit dipenuhi.

## 4. Tingkat Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Di beberapa daerah kepulauan, tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan keluarga berencana masih tergolong rendah. Hal ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Faktor

budaya dan tradisi lokal juga turut memengaruhi pemahaman dan penerimaan terhadap program kesehatan, terutama program keluarga berencana. Masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional mungkin tidak sepenuhnya mendukung penerapan metode kontrasepsi atau perubahan pola hidup sehat yang dianjurkan oleh pemerintah.

#### 5. Ketimpangan Kualitas Pelayanan antara Pulau dan Ibu Kota

Salah satu tantangan internal yang dihadapi adalah adanya ketimpangan kualitas pelayanan antara pulau-pulau utama dan pulau-pulau kecil yang lebih terpencil. Di pulau-pulau utama, seperti ibu kota kabupaten atau provinsi, fasilitas kesehatan dan pelayanan keluarga berencana cenderung lebih baik dan lebih lengkap. Namun, di pulau-pulau kecil, fasilitas dan pelayanan sering kali terbatas, mengakibatkan ketidakmerataan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Ketimpangan ini juga berdampak pada tercapainya tujuan program kesehatan secara keseluruhan.

#### 6. Pendanaan dan Anggaran Terbatas

Pendanaan untuk pengembangan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana di daerah kepulauan sering kali terbatas. Meskipun alokasi anggaran untuk sektor kesehatan biasanya sudah diatur oleh pemerintah, namun terbatasnya anggaran daerah serta kebutuhan logistik yang tinggi di daerah kepulauan seringkali membuat pengelolaan anggaran menjadi sangat menantang. Pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan alat medis, serta peningkatan kualitas pelayanan menjadi

sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

7. **Perencanaan dan Koordinasi yang Tidak Optimal:** Di daerah kepulauan, koordinasi antar berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait seringkali tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dapat menghambat penyelenggaraan program-program kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Terbatasnya komunikasi antara pusat dan daerah, serta kurangnya sinkronisasi antar OPD juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Perencanaan program yang tidak terfokus pada kebutuhan lokal dan karakteristik daerah kepulauan dapat menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan.

8. **Tantangan dalam Pengelolaan Program Keluarga Berencana.**

Program keluarga berencana juga menghadapi tantangan besar di daerah kepulauan, terutama terkait dengan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya pengaturan kelahiran. Di beberapa daerah, masih ada pandangan tradisional yang kurang mendukung keluarga berencana, sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana di daerah terpencil juga membuat sosialisasi dan edukasi mengenai program ini sulit dilakukan secara maksimal.

9. **Isu Kesehatan Lingkungan.**

Daerah kepulauan yang berada di wilayah tropis seringkali menghadapi masalah kesehatan yang berhubungan dengan sanitasi dan lingkungan, seperti penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor (misalnya malaria dan demam berdarah). Keterbatasan

infrastruktur pengelolaan sanitasi dan pengolahan air bersih di daerah terpencil menjadi tantangan besar dalam pencegahan penyakit menular dan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Selain itu, perubahan iklim yang mengarah pada peningkatan intensitas bencana alam, seperti banjir atau angin topan, juga dapat merusak fasilitas kesehatan dan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat.

Menghadapi tantangan-tantangan internal ini memerlukan pendekatan yang adaptif dan inovatif. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antar sektor, memperbanyak tenaga kesehatan yang terlatih, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan yang berkelanjutan juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan dan keluarga berencana.

#### b. Kondisi Eksternal

Tantangan kondisi eksternal dalam pengembangan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi berbagai faktor yang berada di luar kendali langsung pemerintah daerah, namun tetap mempengaruhi efektivitas program dan kebijakan yang diimplementasikan. Faktor eksternal ini berasal dari perubahan sosial, ekonomi, politik, dan kondisi alam yang berpengaruh signifikan terhadap pelayanan dan perkembangan sektor kesehatan di wilayah ini. Berikut adalah beberapa tantangan eksternal yang dihadapi :

1. Keterbatasan Akses ke Teknologi dan Infrastruktur Digital.

Daerah kepulauan sering kali mengalami keterbatasan dalam akses ke teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan modern. Infrastruktur internet yang tidak merata dapat menghambat implementasi *telemedicine*, *e-health*, dan sistem informasi manajemen kesehatan yang lebih efisien. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, pelayanan kesehatan yang berbasis data dan informasi menjadi sulit dijalankan secara optimal, menghambat pengelolaan data kesehatan dan pemantauan program keluarga berencana yang lebih baik.

2. Dinamika Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Kondisi ekonomi daerah kepulauan yang bergantung pada sektor tertentu, seperti perikanan atau pariwisata, rentan terhadap fluktuasi pasar global dan bencana alam. Ketergantungan pada satu atau dua sektor ekonomi dapat menghambat pendanaan untuk sektor kesehatan dan program keluarga berencana, serta memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah. Krisis ekonomi atau penurunan daya beli masyarakat juga berpotensi menurunkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan.

3. Kebijakan Nasional dan Lintas Sektor: Kebijakan nasional dan keputusan pemerintah pusat yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah kepulauan menjadi tantangan eksternal. Misalnya, kebijakan yang diterapkan mungkin tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis daerah tersebut, seperti alokasi anggaran yang lebih

difokuskan pada wilayah daratan atau kota besar, sementara kebutuhan daerah kepulauan sering kali terabaikan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara sektor kesehatan dengan sektor lain, seperti sektor transportasi, pendidikan, dan ekonomi, dapat menghambat pelaksanaan program-program kesehatan secara holistik.

4. Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim.

Daerah kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air laut, bencana alam (seperti banjir, angin topan, atau gempa bumi), serta kerusakan ekosistem yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Perubahan iklim dapat memperburuk masalah sanitasi, mencemari sumber air bersih, dan meningkatkan prevalensi penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti malaria dan demam berdarah. Selain itu, kerusakan infrastruktur akibat bencana alam juga menghambat aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dan pelayanan keluarga berencana.

5. Budaya dan Perubahan Sosial: Tantangan eksternal lainnya terkait dengan budaya dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat kepulauan. Beberapa tradisi atau norma sosial yang masih kuat dapat menjadi penghalang dalam penerimaan program-program kesehatan tertentu, seperti keluarga berencana. Misalnya, di beberapa komunitas, ada pandangan bahwa memiliki banyak anak adalah simbol kemakmuran atau prestise sosial, yang dapat menurunkan efektivitas program keluarga berencana. Selain itu, perubahan gaya hidup dan kebiasaan masyarakat yang lebih cenderung mengikuti tren global bisa berpotensi meningkatkan prevalensi

penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, yang memerlukan penanganan lebih intensif.

6. Keterbatasan Sumber Daya Alam dan Pencemaran Lingkungan: Sumber daya alam yang terbatas di daerah kepulauan, baik itu untuk air bersih, energi, atau bahan baku obat-obatan dan alat medis, dapat menghambat pengembangan layanan kesehatan yang optimal. Selain itu, polusi atau pencemaran lingkungan, seperti pencemaran laut atau udara, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih kompleks bagi masyarakat, terutama dalam pengendalian penyakit berbasis lingkungan dan penyediaan sanitasi yang baik. Upaya untuk mengatasi pencemaran juga memerlukan kerjasama lintas sektor yang belum selalu terwujud dengan baik.

7. Fluktuasi Kunjungan Wisatawan dan Dampaknya terhadap Kesehatan.

Di beberapa daerah kepulauan, pariwisata menjadi sumber pendapatan utama, namun fluktuasi jumlah wisatawan yang tinggi dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan. Lonjakan jumlah wisatawan yang tidak terduga dapat menyebabkan beban pada fasilitas kesehatan lokal, terutama dalam menangani penyakit menular, kecelakaan, atau keadaan darurat medis. Selain itu, kunjungan wisatawan juga bisa meningkatkan risiko penyebaran penyakit baru, yang berpotensi menambah tantangan dalam pengendalian epidemi.

8. Kerentanan terhadap Bencana Alam dan Keadaan Darurat.

Daerah kepulauan sering kali menjadi kawasan rawan bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, atau

angin topan, yang bisa merusak infrastruktur kesehatan dan menyebabkan kekurangan pasokan obat-obatan, alat kesehatan, serta tenaga medis. Keadaan darurat ini tidak hanya memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menyulitkan penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menjadi faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pengembangan sektor kesehatan.

9. Ketergantungan pada Dana Hibah atau Bantuan Luar Negeri.

Beberapa daerah kepulauan, terutama yang memiliki keterbatasan dalam pengelolaan anggaran, sering kali bergantung pada bantuan luar negeri atau dana hibah untuk membiayai program kesehatan. Ketergantungan ini bisa menjadi tantangan jika terjadi perubahan kebijakan luar negeri atau penghentian bantuan, yang dapat memengaruhi kelangsungan program yang sudah berjalan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas keuangan daerah untuk mendanai program kesehatan secara mandiri perlu menjadi perhatian.

Untuk menghadapi tantangan eksternal ini, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pusat, sektor swasta, masyarakat, serta organisasi internasional dalam merancang kebijakan dan program yang adaptif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, sektor kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dapat berkembang secara optimal meskipun menghadapi berbagai hambatan eksternal.

## 2. Peluang

Peluang juga merupakan unsur yang sangat penting untuk dianalisis guna mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki untuk mengatasi tantangan dan mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas. Analisis peluang ini disusun dalam empat kategori utama, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti penerima manfaat dari pelayanan kesehatan, arah pengembangan pelayanan kesehatan, potensi penguatan sumber daya kesehatan, serta dukungan dan komitmen dari Pemerintah, lintas OPD, dan sektor terkait lainnya. Semua faktor ini akan menjadi daya ungkit tambahan dalam memperkuat implementasi pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun ke depan adalah :

### a. Pemanfaatan Teknologi untuk Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh

Salah satu peluang terbesar dalam pengembangan pelayanan kesehatan di daerah kepulauan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti *telemedicine*, untuk memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil. Dengan infrastruktur digital yang semakin berkembang, pelayanan kesehatan dapat diberikan secara jarak jauh melalui konsultasi medis online, pengelolaan data pasien secara digital, serta edukasi

kesehatan berbasis aplikasi. Hal ini mengurangi kesenjangan akses pelayanan yang sering dihadapi oleh masyarakat kepulauan karena terbatasnya fasilitas kesehatan fisik.

b. Pengembangan Infrastruktur Kesehatan Berbasis Sistem Modular

Keterbatasan aksesibilitas ke fasilitas kesehatan di beberapa pulau kecil dapat diatasi dengan pengembangan infrastruktur kesehatan berbasis sistem modular atau layanan kesehatan terintegrasi yang dapat dipindah-pindahkan (*mobile health units*). Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem kesehatan yang fleksibel, pelayanan kesehatan dapat dijangkau lebih merata di berbagai pulau, tanpa perlu membangun fasilitas kesehatan permanen di setiap lokasi.

c. Sinergi dengan Program Pemerintah dan Lintas Sektor

Terdapat peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pengembangan pelayanan kesehatan dan program keluarga berencana melalui sinergi antara Dinas Kesehatan dan sektor lain seperti pendidikan, sosial, ekonomi, serta sektor transportasi. Misalnya, melalui kerjasama dengan sektor transportasi, akses masyarakat kepulauan ke fasilitas kesehatan dapat lebih mudah dijangkau, sementara sinergi dengan sektor pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan keluarga berencana. Komitmen dari berbagai sektor ini juga dapat meningkatkan alokasi dana dan sumber daya yang diperlukan.

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Lokal

Salah satu peluang besar dalam pengembangan pelayanan kesehatan adalah pemberdayaan masyarakat lokal dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan di tingkat daerah. Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga medis, seperti bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya di daerah kepulauan, dapat memastikan bahwa pelayanan kesehatan tetap berkualitas meskipun terbatas pada sumber daya manusia yang ada. Selain itu, dengan pemberdayaan masyarakat dalam program keluarga berencana, masyarakat dapat lebih aktif dalam merencanakan jumlah anak yang sesuai dengan kapasitas ekonomi dan sosial keluarga mereka.

e. Potensi Pengembangan Pariwisata Sehat

Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Anambas, dengan keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang dimilikinya, memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata sehat (*health tourism*) yang dapat mendukung peningkatan ekonomi daerah sekaligus memperkenalkan pola hidup sehat. Pariwisata sehat yang berbasis pada ekowisata dan wisata berbasis kesehatan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dan program keluarga berencana. Selain itu, pariwisata sehat ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.

f. Kerjasama dengan Organisasi Internasional dan Swasta.

Dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, daerah kepulauan dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan organisasi internasional, lembaga donor, dan sektor swasta. Bantuan dalam bentuk pendanaan,

bantuan teknis, dan transfer teknologi dari organisasi internasional dapat mendukung pengembangan infrastruktur kesehatan dan pelaksanaan program kesehatan yang lebih efisien. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta, seperti perusahaan farmasi dan teknologi, juga dapat meningkatkan ketersediaan obat, alat kesehatan, serta solusi berbasis teknologi untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau.

g. Peningkatan Kualitas Air Bersih dan Sanitasi.

Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang sehat bagi masyarakat kepulauan. Dengan memprioritaskan pembangunan sarana air bersih yang efisien dan ramah lingkungan, masalah kesehatan yang terkait dengan air yang tidak bersih dan sanitasi yang buruk dapat ditekan. Program kesehatan terkait sanitasi yang lebih baik akan berdampak positif terhadap penurunan angka kematian bayi, pengendalian penyakit menular, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

h. Penguatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan.

Dengan berkembangnya teknologi dan sistem informasi kesehatan, ada peluang untuk memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan data kesehatan di daerah kepulauan. Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang status kesehatan masyarakat, prevalensi penyakit, serta keberhasilan program keluarga berencana. Hal ini akan memudahkan pemerintah dan lembaga terkait dalam merencanakan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

- i. Program Kesehatan Berbasis Komunitas: Masyarakat kepulauan cenderung memiliki ikatan sosial yang kuat, dan ini merupakan peluang untuk mengembangkan program-program kesehatan berbasis komunitas. Program seperti penyuluhan kesehatan oleh kader kesehatan lokal, penguatan posyandu, dan pengembangan desa siaga kesehatan dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keluarga berencana di tingkat desa atau kelurahan. Melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengimplementasikan program ini akan menciptakan keberlanjutan dan hasil yang lebih baik.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini secara efektif, daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mengatasi tantangan yang ada dalam pengembangan sektor kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, serta memastikan bahwa layanan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, meskipun berada di daerah yang terpencil dan memiliki akses terbatas.

## **2.5 Permasalahan dan Isu-isu Strategis**

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perlu langkah penting untuk memahami hambatan yang dihadapi seperti keterbatasan akses ke wilayah terpencil, sumber daya manusia kesehatan yang belum merata, tingginya kasus pernikahan dini, serta tingginya kasus kesehatan keluarga. Hal ini berdampak pada implementasi pelayanan kesehatan,

serta isu-isu strategis yang berporos pada optimalisasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, serta percepatan reformasi birokrasi bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

## **2.6 Identifikasi permasalahan Berdasarkan**

Sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan kesehatan, pengendalian penduduk, dan penguatan ketahanan keluarga, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Identifikasi permasalahan ini menjadi langkah penting untuk memahami hambatan yang dihadapi, baik dari aspek kebijakan, koordinasi, pelaksanaan tugas, hingga pengelolaan sumber daya, sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi dinas:

### **1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan**

Permasalahan yang kerap dihadapi adalah keterbatasan data dan informasi yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan regulasi nasional dan dinamika kebutuhan masyarakat juga menjadi tantangan dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan aplikatif.

### **2. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan**

Pelaksanaan koordinasi lintas sektor sering kali terkendala oleh kurangnya komunikasi yang efektif antarinstansi. Perbedaan prioritas dan kapasitas antarlembaga juga mempengaruhi sinkronisasi dalam

implementasi kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Dukungan Administrasi

Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi menjadi kendala dalam memberikan dukungan administrasi yang optimal. Selain itu, tantangan geografis di wilayah Kepulauan Anambas juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan layanan yang merata.

### 4. Supervisi dan Pengawasan Administrasi

Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan administrasi pemerintahan sering kali belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan mekanisme pengawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi.

### 5. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Permasalahan umum dalam pengelolaan barang milik daerah meliputi keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan modernisasi aset, serta belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan barang milik daerah.

### 6. Pengawasan Pelaksanaan Tugas Internal

Kurangnya evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan terhadap kinerja aparatur di lingkungan dinas menjadi kendala dalam memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.

Identifikasi permasalahan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang hambatan yang dihadapi dinas dalam menjalankan perannya. Pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan ini

diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merumuskan solusi dan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dinas ke depan.

Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya :

**Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35.)  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kebijakan belum optimal	Kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika lokal	Data pendukung kebijakan yang kurang akurat dan keterbatasan sumber daya untuk analisis kebijakan
2	Kurangnya sinkronisasi lintas sektor	Implementasi kebijakan sering tidak terkoordinasi dengan baik antarinstansi	Komunikasi lintas sektor kurang efektif dan perbedaan prioritas antarinstansi
3	Keterbatasan akses layanan kesehatan	Tidak meratanya distribusi layanan kesehatan di wilayah terpencil	Keterbatasan infrastruktur, transportasi, dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan
4	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)	SDM belum merata baik secara kompetensi maupun jumlah di berbagai wilayah	Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM yang terintegrasi
5	Pengelolaan barang milik daerah yang belum maksimal	Sistem pengelolaan aset daerah masih lemah, termasuk dalam pemeliharaan dan pencatatan	Terbatasnya anggaran pemeliharaan dan belum adanya sistem manajemen aset yang terstandarisasi
6	Pelaksanaan pengawasan internal belum optimal	Pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur masih sporadis dan kurang berkelanjutan	Kurangnya sistem evaluasi yang komprehensif dan minimnya sumber daya pengawasan
7	Tantangan dalam pengendalian penduduk	Tingginya angka pernikahan dini dan kurangnya kesadaran akan program keluarga berencana	Edukasi masyarakat yang masih rendah dan terbatasnya tenaga penyuluh keluarga berencana
8	Ketahanan keluarga yang belum merata	Tingginya angka kasus kesehatan keluarga, gizi buruk, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Edukasi kesehatan dan ketahanan keluarga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
9	Kurangnya respons terhadap arahan tambahan Bupati	Fungsi tambahan sering mengakibatkan beban kerja yang tidak seimbang	Keterbatasan sumber daya untuk menyesuaikan arahan tambahan secara cepat
10	Kurangnya Pendampingan hukum serta keselamatan kerja terhadap pembangunan fasilitas kesehatan	Implementasi kebijakan sering tidak terkoordinasi dengan baik antarinstansi	Komunikasi lintas sektor kurang efektif dan perbedaan prioritas antarinstansi

Tabel ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas kebijakan, sasaran pembangunan, serta langkah strategis yang harus diambil guna mengatasi permasalahan utama dalam penyelenggaraan tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

## **2.7 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima tahun kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam empat (5) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur.

2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif.
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata.
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat pada Misi Ke-1 (satu) yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur” dan pada Misi Ke-3 (tiga) yaitu “Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif”.

## **2.8 Telaahan Renstra K/L dan Rentra**

Pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Dalam Renstra Kementerian Kesehatan, Visi Presiden pada bidang kesehatan diterjemahkan ke dalam Visi Kementerian Kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Di dalam Renstra Kementerian kesehatan disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Pada Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, Misi Presiden di bidang kesehatan diterjemahkan ke dalam empat misi Kementerian Kesehatan yaitu sebagai berikut. Pertama, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kedua, menurunkan angka stunting pada balita. Ketiga, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional. Keempat, Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri. Di samping itu, di dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2020–2024, terdapat lima tujuan strategis Kementerian Kesehatan. Pertama, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Ketiga, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Keempat, peningkatan sumber daya kesehatan. Kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif.

Dalam rangka pencapaian tujuan strategis, terdapat delapan sasaran strategis yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, sebagai berikut.

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat.
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan.

7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.
9. Meningkatnya upaya penyehatan lingkungan dan upaya pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja.
10. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
11. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dengan pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten.
12. Menurunnya Angka kelahiran menurut usia tertentu/*Age Spesific Fertility Rate* (ASFR) dan Angka kelahiran total/*Total Fertility Rate* (TFR) pada kelompok umur 15-19 tahun, serta menurunnya kehamilan tidak direncanakan.
13. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga).
14. Meningkatnya Pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK).
15. Meningkatnya proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi.

Keseluruhan sasaran strategis di atas relevan dengan isu atau permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Anambas di bidang pelayanan kesehatan. Sasaran strategis yang pertama hingga yang keenam diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu sasaran strategis ketujuh dan kedelapan diarahkan untuk meningkatkan

kualitas tata kelola internal pengampu urusan di bidang kesehatan baik di tingkat kementerian, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota.

## **2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:

- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;
- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; dan
- d. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman utama dalam penataan ruang. RTRW bertujuan untuk mewujudkan wilayah kepulauan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis agromarinawisata, minyak dan gas, serta industri ramah lingkungan. Sebagai acuan, RTRW berfungsi untuk menyusun RDTR, perencanaan pembangunan jangka panjang, dan jangka menengah, serta menjadi dasar dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pengembangan tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan hierarki Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pengembangan sistem infrastruktur wilayah dilakukan secara terintegrasi, meliputi jaringan transportasi laut, darat dan udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta fasilitas pendukung lainnya, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, dengan fokus pada perlindungan kawasan lindung seperti hutan, daerah resapan air, dan ruang terbuka hijau. Upaya ini diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melampaui daya dukung lingkungan serta pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk melalui optimalisasi kawasan pesisir dan pulau kecil berbasis ekosistem,

pengembangan energi terbarukan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Sektor kelautan, agribisnis, pariwisata, dan industri kecil menengah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan daya saing lokal. Selain itu, kawasan strategis, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan, akan dikembangkan secara optimal, dengan tetap mempertahankan keseimbangan fungsi pertahanan, keamanan, dan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Rencana pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu menjadi wilayah yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan RTRW tahun 2023–2043.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memainkan peran penting dalam memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, termasuk dalam sektor kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Sebagai panduan perencanaan yang terintegrasi, RTRW memberikan kerangka tata ruang untuk pengembangan wilayah yang mendukung distribusi fasilitas kesehatan, perumahan yang layak, dan ruang publik yang ramah

lingkungan. Sementara itu, KLHS memberikan analisis komprehensif terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang menjadi landasan penting untuk menilai dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, keterhubungan dengan RTRW dan KLHS sangat nyata, terutama dalam penyediaan akses kesehatan yang merata di wilayah terpencil dan kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas. RTRW memastikan bahwa lokasi fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, direncanakan secara strategis untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. KLHS, di sisi lain, membantu menilai risiko lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, serta kerentanan terhadap bencana alam yang memengaruhi akses dan kualitas layanan kesehatan.

Selain itu, KLHS menjadi instrumen penting dalam mendukung program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, KLHS memberikan panduan untuk mengelola pertumbuhan penduduk secara seimbang dengan kapasitas wilayah. Ini mencakup kebijakan untuk mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program keluarga berencana yang berbasis data.

Sinergi antara RTRW, KLHS, dan program Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang holistik. Dengan integrasi ini, dinas dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya meningkatkan akses dan kualitas

layanan kesehatan, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan demografi yang menjadi pilar pembangunan berkelanjutan.

## **2.10 Penentuan Isu-isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis merupakan langkah penting dalam merumuskan arah kebijakan dan program kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Isu-isu strategis ini diidentifikasi berdasarkan analisis kondisi faktual, capaian sebelumnya, serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas. Berikut adalah isu-isu strategis utama yang relevan:

### **1. Kesenjangan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan**

Masih terdapat ketimpangan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Hal ini disebabkan oleh minimnya infrastruktur, keterbatasan tenaga kesehatan, serta tantangan geografis, sehingga diperlukan upaya untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara merata.

### **2. Tantangan dalam Pengendalian Penduduk**

Pengendalian penduduk menghadapi kendala berupa tingginya angka kelahiran dan pernikahan dini, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana. Peningkatan edukasi, advokasi, dan peran tenaga penyuluh menjadi strategi penting untuk mengatasi tantangan ini.

### **3. Ketahanan Kesehatan Keluarga yang Belum Optimal**

Masalah gizi buruk, stunting, dan kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi tantangan yang

memengaruhi ketahanan keluarga. Kurangnya edukasi kesehatan keluarga dan akses ke program intervensi memerlukan solusi terpadu melalui edukasi, pemberdayaan perempuan, dan penguatan layanan pendukung kesehatan keluarga.

4. Peningkatan Daya Saing dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan distribusi sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, sertifikasi, dan insentif berbasis kinerja menjadi prioritas untuk memastikan pelayanan yang profesional dan berkualitas.

5. Pengelolaan Risiko Bencana dan Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan

Kabupaten Kepulauan Anambas rentan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim, yang dapat mengganggu layanan kesehatan. Penguatan mitigasi bencana, kesiapan fasilitas kesehatan, dan edukasi masyarakat diperlukan untuk mengurangi risiko kesehatan akibat bencana.

6. Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Pengelolaan data kesehatan yang belum optimal menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan penerapan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital, perencanaan dan evaluasi program dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

7. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Program

Tata kelola program yang kuat dan akuntabel diperlukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur, melibatkan masyarakat dan mitra kerja, akan meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan program.

Identifikasi isu-isu strategis ini menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan dan program kerja yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan yang merata, program pengendalian penduduk yang efektif, serta penguatan ketahanan keluarga yang berdaya saing. Tujuan ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sasaran utama yang hendak dicapai meliputi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil, pengurangan angka kelahiran melalui program keluarga berencana yang berbasis edukasi, dan penurunan prevalensi stunting serta gizi buruk pada keluarga. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, optimalisasi pengelolaan data dan informasi kesehatan, serta penguatan tata kelola program menjadi prioritas strategis untuk mewujudkan pelayanan yang profesional dan akuntabel. Dengan sasaran ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menikmati layanan yang berkualitas, merata, dan berdampak positif pada kesejahteraan mereka.

Berikut ini adalah tabel yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, beserta indikator kinerja dan target yang telah disusun untuk lima tahun mendatang, yakni dari 2025 hingga 2029.

**Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25.)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Permendagri 18 Tahun 2020	Meningkatkan Kualitas dan Akses Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas		<b>Usia Harapan Hidup</b>	68,84	69,3	69,77	70,23	70,69	71,15	
			<b>Prevalensi Stunting</b>	13,3	12,5	12,3	11,8	11,3	11	
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	68,84	69,3	69,77	70,23	70,69	71,15	
			Prevalensi Stunting	13,3	12,5	12,3	11,8	11,3	11	
	Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas		<b>Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)</b>	57,3	58,1	58,9	59,7	60,5	61,3	
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rates/ ASFR 15-19)	29,3	29,2	29	28,8	28,6	28	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kehamilan Tidak direncanakan (KTD)	28,3	27,3	26,7	25,9	24,4	23,6	
			Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	95,65	95,7	95,75	95,8	95,85	95,9	
			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	56,1	57,5	58,2	59	60	61	
	Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		<b>Predikat AKIP</b>	CC	B	B	B	B	B	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	Nilai AKIP	60,25	61,14	62,42	63,5	64,62	65,8	



### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan yang berorientasi pada penguatan akses, kualitas, dan efisiensi layanan publik di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, serta ketahanan keluarga. Strategi ini mencakup pendekatan promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, penguatan infrastruktur kesehatan di wilayah terpencil, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung layanan berbasis digital. Selain itu, pemberdayaan komunitas lokal melalui program edukasi kesehatan dan keluarga berencana menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.

Kebijakan yang diambil mencakup perluasan cakupan layanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta integrasi program pengendalian penduduk dengan upaya penurunan stunting dan gizi buruk. Kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan sinergi lintas sektor dan optimalisasi pengelolaan sumber daya melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan mengutamakan inklusivitas dan keberlanjutan, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan dampak jangka panjang yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:



**Tabel. 3.2 (Table T-C.26)  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera				
Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur 3. Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas dan Akses Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Penguatan kualitas kesehatan di wilayah terpencil	Peningkatan akses layanan kesehatan universal
			Peningkatan fasilitas layanan kesehatan	· Peningkatan mutu fasilitas kesehatan yang terakreditasi
			Pelatihan dan sertifikasi tenaga kesehatan	Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan
			Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Pemberdayaan SDM kesehatan melalui penguatan kompetensi
			Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman di seluruh unit layanan kesehatan	Penguatan akses sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman di seluruh unit layanan kesehatan
			Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat di wilayah terpencil	Pemberdayaan Masyarakat yang mendukung pembangunan kesehatan
			Meningkatkan akreditasi setiap unit pelayanan kesehatan	Peningkatan mutu fasilitas kesehatan yang terakreditasi
			2	Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas



			Edukasi dan advokasi berbasis komunitas	Edukasi dan advokasi berbasis komunitas
			Peningkatan akses ke layanan konseling keluarga dan Kolaborasi dengan lembaga terkait	Penyediaan layanan pembinaan keluarga yang terintegrasi
			Peningkatan Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Penyediaan Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga
3	Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola
			Pengembangan kapasitas ASN	Optimalisasi teknologi informasi

Tabel ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial-politik di Kabupaten Kepulauan Anambas.



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas merumuskan rencana program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, serta penguatan ketahanan keluarga. Program-program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara holistik, mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Berikut adalah daftar program- program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Program ini bertujuan mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  
Fokus program ini adalah menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan cakupan imunisasi, serta penanganan penyakit menular dan tidak menular secara terintegrasi.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional



berkelanjutan untuk memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dan responsif.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman  
Program ini bertujuan menjamin ketersediaan obat, alat kesehatan, dan makanan yang aman, berkualitas, terjangkau dan bermanfaat bagi masyarakat, serta memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  
Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui edukasi kesehatan, peningkatan peran Posyandu dan Desa Siaga, serta promosi pola hidup bersih dan sehat guna menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan mandiri.
6. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, memastikan keselamatan pasien, meningkatkan kepercayaan masyarakat, efisiensi operasional, dan mendukung program pemerintah menuju derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
7. Program Pengendalian Penduduk  
Fokus program ini adalah mengelola pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kesadaran keluarga berencana, penanganan angka kelahiran tinggi, serta pengendalian pernikahan dini untuk menciptakan keseimbangan demografi yang berkelanjutan.
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)  
Program ini bertujuan memperluas akses dan kualitas layanan KB, mengoptimalkan peran penyuluh KB, serta meningkatkan cakupan pembinaan Kampung KB sebagai model implementasi program KB yang terintegrasi.



#### 9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini berfokus pada penguatan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas keluarga dalam pengelolaan kesehatan, serta penyediaan layanan pendukung untuk menciptakan keluarga yang mandiri dan berkualitas..

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 4.1 (Tabel T-C.27.)

**Tabel. 4.1 (Tabel T-C. 27.)**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan**  
**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>																
<b>Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau</b>	Angka kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu dalam periode /Jumlah kelahiran hidup dalam periode × 100.000	0/10 0.00 0 KH	0/1 00. 000 KH	52.245. 403.900 ,00	0/1 00. 000 KH	60.485. 665.881 ,00	0/1 00. 000 KH	61.733. 719.626 ,00	0/1 00. 000 KH	63.599. 037.506 ,00	0/1 00. 000 KH	65.408. 112.163 ,00	0/1 00. 000 KH	68.303. 635.167 ,00	
<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>																
<i>Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan</i>	<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarannya</i>	14	14	28.824. 675.400 ,00	14	36.434. 937.381 ,00	14	37.597. 991.126 ,00	14	39.348. 309.006 ,00	14	39.937. 383.663 ,00	14	42.832. 906.667 ,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		prasarana nya	a / Jumlah Fasilitas Kesehatan x 100%													
	Pembangu n Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarak at (Puskesm as) yang Dibangun	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	7	1	1.000.0 00.000, 00	2	2.000.0 00.000, 00	1	1.000.0 00.000, 00	1	1.000.0 00.000, 00	1	1.000.0 00.000, 00	1	1.000.0 00.000, 00
	Pembangu n Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	1	2	4.323.0 00.000, 00	2	12.892. 500.000 ,00	2	13.952. 500.001 ,00	2	15.564. 500.000 ,00	2	15.178. 416.527 ,00	2	17.915. 939.531 ,00
	Pembangu n Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	6	2	800.000 .000,00	2	800.000 .000,00	2	800.000 .000,00	2	800.000 .000,00	2	800.000 .000,00	2	800.000 .000,00
	Pengembanga n Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatk an Sarana, Prasarana , Alat Kesehatan dan SDM agar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatka n Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5	2	500.000 .000,00	2	500.000 .000,00	2	500.000 .000,00	2	500.000 .000,00	2	500.000 .000,00	2	500.000 .000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Sesuai Standar															
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3	3	700.000.000,00	3	700.000.000,00	3	700.000.000,00	3	700.000.000,00	3	700.000.000,00	3	700.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	8	500.000.000,00	8	500.000.000,00	8	500.000.000,00	8	500.000.000,00	8	500.000.000,00	8	500.000.000,00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18	42	3.000.000.000,00	42	3.000.000.000,00	42	3.000.000.000,00	42	3.000.000.000,00	42	3.000.000.000,00	42	3.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Kesehatan yang Disediakan	yang Disediakan														
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	272	14	701.675.400,00	14	701.675.400,00	14	701.675.400,00	14	701.675.400,00	14	701.675.400,00	14	701.675.400,00	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	7	13	600.000.000,00	13	600.000.000,00	13	600.000.000,00	13	600.000.000,00	13	600.000.000,00	13	600.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2	2	2.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	2	1.542.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	sakit																
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	13	13	10.000.000.000,00	13	11.000.000.000,00	13	12.000.000.000,00	13	12.592.000.000,00	13	13.542.000.000,00	13	13.700.000.000,00		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatanny	10	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas															
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	4	2	3.500.000.000,00	2	1.540.761.981,00	2	1.101.815.725,00	2	1.190.133.606,00	2	1.215.291.736,00	2	1.215.291.736,00		
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	13	13	100.000.000,00	13	100.000.000,00	13	100.000.000,00	13	100.000.000,00	13	100.000.000,00	13	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Makanan ke Fasilitas Kesehatan																
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Tercapainya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Unit Kesehatan Perorangan (UKP) di tingkat kabupaten/kota melalui penyediaan layanan rujukan yang efisien dan efektif, guna mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.	Persentase Desa/kelu rahan Universal Child Immunizat ion (UCI)	Jumlah desa/kelura han UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ Jum lah desa/kelura han disuatu wilayah kerja padankurun waktu yang sama*100	30	35	23.220. 728.500 ,00	40	23.950. 728.500 ,00	50	23.985. 728.500 ,00	50	24.100. 728.500 ,00	55	25.370. 728.500 ,00	55	25.370. 728.500 ,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	756	740	30.000.000,00	726	308.000.000,00	711	275.000.000,00	711	275.000.000,00	711	275.000.000,00	711	275.000.000,00		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	728	720	250.000.000,00	713	250.000.000,00	706	250.000.000,00	671	250.000.000,00	692	250.000.000,00	692	250.000.000,00		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	728	720	250.000.000,00	713	250.000.000,00	706	250.000.000,00	671	250.000.000,00	692	250.000.000,00	692	250.000.000,00		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	728	720	250.000.000,00	713	250.000.000,00	706	250.000.000,00	671	250.000.000,00	692	250.000.000,00	692	250.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8030	8.067	240.000.000,00	8.086	240.000.000,00	8.105	240.000.000,00	8.112	240.000.000,00	8.123	240.000.000,00	8.123	240.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26050	33.381	240.000.000,00	33.981	240.000.000,00	34.581	240.000.000,00	35.181	240.000.000,00	35.781	240.000.000,00	35.781	240.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3290	3.460	385.000.000,00	3.630	385.000.000,00	3.800	440.000.000,00	3.970	495.000.000,00	4.140	550.000.000,00	4.140	550.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita	Jumlah Penderita Hipertensi yang	Jumlah Penderita Hipertensi yang	3546	3.385	220.000.000,00	3.452	275.000.000,00	3.519	330.000.000,00	3.586	355.000.000,00	3.653	440.000.000,00	3.653	440.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Hipertensi	Mendapat kan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar														
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapat kan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	759	640 220.000 .000,00	652 275.000 .000,00	664 275.000 .000,00	676 310.000 .000,00	688 440.000 .000,00	688 440.000 .000,00	688 440.000 .000,00	688 440.000 .000,00	688 440.000 .000,00	688 440.000 .000,00	688 440.000 .000,00	688 440.000 .000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapat kan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	39	39 330.000 .000,00	39 330.000 .000,00	39 330.000 .000,00	39 330.000 .000,00	39 330.000 .000,00	39 330.000 .000,00	39 330.000 .000,00	39 330.000 .000,00	39 330.000 .000,00	39 330.000 .000,00	39 330.000 .000,00	39 330.000 .000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulo sis yang Mendapat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatka	1191	1.17 0 220.000 .000,00	1.00 6 220.000 .000,00	868 220.000 .000,00	770 220.000 .000,00	695 220.000 .000,00	695 220.000 .000,00	695 220.000 .000,00	695 220.000 .000,00	695 220.000 .000,00	695 220.000 .000,00	695 220.000 .000,00	695 220.000 .000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		kan Pelayanan Sesuai Standar	n Pelayanan Sesuai Standar													
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1910	1.958 330.000.000,00	2.007 330.000.000,00	2.057 330.000.000,00	2.108 330.000.000,00	2.161 330.000.000,00	2.161 330.000.000,00	2.161 330.000.000,00	2.161 330.000.000,00	2.161 330.000.000,00	2.161 330.000.000,00	2.161 330.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	3	3 110.000.000,00	3 115.000.000,00	3 110.000.000,00	3 110.000.000,00	3 110.000.000,00	3 110.000.000,00	3 110.000.000,00	3 110.000.000,00	3 110.000.000,00	3 110.000.000,00	3 110.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	1	1 500.000.000,00	1 350.000.000,00	1 500.000.000,00	1 500.000.000,00	1 500.000.000,00	1 500.000.000,00	1 500.000.000,00	1 500.000.000,00	1 500.000.000,00	1 500.000.000,00	1 500.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Kesehatan Gizi Masyarakat	Gizi Masyarakat														
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	295.000.000,00	1	250.000.000,00	1	295.000.000,00	1	295.000.000,00	1	295.000.000,00	1	295.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	4	387.728.500,00	4	387.728.500,00	4	387.728.500,00	4	387.728.500,00	4	387.728.500,00	4	387.728.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	280.000.000,00	1	250.000.000,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13	13	360.000.000,00	13	360.000.000,00	13	360.000.000,00	13	360.000.000,00	13	360.000.000,00	13	360.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	112	112	220.000.000,00	112	220.000.000,00	112	220.000.000,00	112	220.000.000,00	112	220.000.000,00	112	220.000.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	390.000.000,00	1	390.000.000,00	1	390.000.000,00	1	390.000.000,00	1	390.000.000,00	1	390.000.000,00	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	12	11.000.000.000,00	12	11.000.000.000,00	12	11.000.000.000,00	12	11.000.000.000,00	12	11.000.000.000,00	12	11.000.000.000,00	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Luar Biasa KLB ke Laboratorium	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratoriu	10	10	55.000.000,00	10	55.000.000,00	10	55.000.000,00	10	55.000.000,00	10	55.000.000,00	10	55.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Rujukan/Nasional	Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	m Rujukan/Nasional yang Didistribusikan														
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	13	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10	10	188.000.000,00	10	188.000.000,00	10	188.000.000,00	10	188.000.000,00	10	188.000.000,00	10	188.000.000,00	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	walid	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13	-	-	1	500.000.000,00	-	-	-	-	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10	10	160.000.000,00	10	160.000.000,00	10	160.000.000,00	10	160.000.000,00	10	160.000.000,00	10	160.000.000,00	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	13	13	160.000.000,00	13	160.000.000,00	13	160.000.000,00	13	160.000.000,00	13	160.000.000,00	13	160.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	119	121	250.000.000,00	124	250.000.000,00	125	250.000.000,00	126	250.000.000,00	129	250.000.000,00	129	250.000.000,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.305	1.305	195.000.000,00	1.305	195.000.000,00	1.305	195.000.000,00	1.305	195.000.000,00	1.305	195.000.000,00	1.305	195.000.000,00	
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan	5	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		ditemukan aktivitas merokok	aktifitas merokok														
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	
	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penderita IMS	Jumlah Orang dengan penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang dengan penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	3	3	330.000.000,00	4	330.000.000,00	5	330.000.000,00	7	330.000.000,00	11	330.000.000,00	11	330.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Sesuai Standar	Standar														
	Pelayanan Kesehatan Penderita Campak	Jumlah Orang dengan penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	4 220.000.000,00	4	4 220.000.000,00	4	4 220.000.000,00	4	4 220.000.000,00	4	4 220.000.000,00	4	4 220.000.000,00	4	4 220.000.000,00
	Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta	Jumlah Orang dengan penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	1 275.000.000,00	1	1 200.000.000,00	1	1 275.000.000,00	1	1 275.000.000,00	1	1 275.000.000,00	1	1 275.000.000,00	1	1 275.000.000,00
	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	1 110.000.000,00	1	1 110.000.000,00	1	1 110.000.000,00	1	1 110.000.000,00	1	1 110.000.000,00	1	1 110.000.000,00	1	1 110.000.000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan	Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9671	9.671	110.000.000,00	9.768	110.000.000,00	9.768	110.000.000,00	9.866	110.000.000,00	9.866	110.000.000,00	9.866	110.000.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia	Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6	6	330.000.000,00	6	330.000.000,00	6	330.000.000,00	6	330.000.000,00	6	330.000.000,00	6	330.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Penanggulangan penyakit IMS	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan akan penanggulangan penyakit IMS	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan akan penanggulangan penyakit IMS	1	1	275.000.000,00	1	200.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	
	Penanggulangan penyakit Kusta	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan akan penanggulangan penyakit Kusta	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan akan penanggulangan penyakit Kusta	1	1	275.000.000,00	1	217.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	
	Penanggulangan penyakit Filariasis	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan akan penanggulangan penyakit Filariasis	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan akan penanggulangan penyakit Filariasis	1	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	
	Penanggulangan penyakit Kecacingan	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan akan penanggulangan penyakit Kecacingan	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan akan penanggulangan penyakit Kecacingan	1	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Penanggulangan penyakit Frambusia	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Frambusia	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Frambusia	1	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	
	Penangulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Imunisasi	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Imunisasi	1	1	330.000.000,00	1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	330.000.000,00	1	330.000.000,00	1	330.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergenisif (PONEK) dan sistem rujukan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergenisif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergenisif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	-	-	-	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		6	6	330.000.000,00	6	330.000.000,00	6	330.000.000,00	6	330.000.000,00	6	330.000.000,00	6	330.000.000,00	
	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</i>																
	<i>Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem informasi kesehatan dalam mendukung pengambilan keputusan yang akurat, cepat, dan berbasiskan data di seluruh tingkat pelayanan kesehatan</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah / Jumlah aplikasi x 100%</i>	1	4	200.000.000,00	3	100.000.000,00	3	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>																	
	<b>Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan</b>	<b>Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan</b>	<b>Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki sertifikasi/ STR aktif dan pelatihan sesuai standar/Total tenaga kesehatan x 100%</b>	76	76	450.000.000,00	79	650.000.000,00	81	650.000.000,00	87	800.000.000,00	89	800.000.000,00	89	800.000.000,00	
	<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</i>																
	<i>Meningkatnya legalitas dan kepatuhan tenaga kesehatan dalam</i>	<i>Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki perizinan</i>	<i>Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki perizinan</i>	57	-	-	-	-	-	-	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
menjalankan praktik di wilayah kabupaten/kota	praktik tenaga kesehatan	praktik tenaga kesehatan / Jumlah Tenaga Kesehatan x 100%															
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	311	-	-	-	-	-	-	550	50.000.000,00	550	50.000.000,00	550	50.000.000,00		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																	
Tersedianya sumber daya manusia kesehatan yang sesuai kebutuhan,	Persentase Fasilitas Kesehatan dan dievaluasi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pembinaan	100	100	200.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>seimbang, dan merata dalam mendukung pelaksanaan UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota</i>	<i>SDM Kesehatan</i>	<i>dan evaluasi SDMK / Jumlah Fasilitas Kesehatan x 100%</i>														
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyanke s)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30	30	100.000 .000,00	50	200.000 .000,00	70	200.000 .000,00	80	250.000 .000,00	90	250.000 .000,00	90	250.000 .000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	3	100.000 .000,00	3	200.000 .000,00	3	200.000 .000,00	3	200.000 .000,00	3	200.000 .000,00	3	200.000 .000,00	
<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia</i>																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>																
	<i>Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis SDM kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas di tingkat daerah</i>	<i>Persentase sdmk yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi i tenaga kesehatan</i>	<i>Jumlah SDMK yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan / Jumlah SDMK x 100%</i>	60	60 250.000 .000,00	80 250.000 .000,00	85 250.000 .000,00	90 300.000 .000,00	90 300.000 .000,00	90 300.000 .000,00	90 300.000 .000,00	90 300.000 .000,00	90 300.000 .000,00	90 300.000 .000,00	90 300.000 .000,00		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30	30 125.000 .000,00	60 125.000 .000,00	90 125.000 .000,00	100 150.000 .000,00	100 150.000 .000,00	100 150.000 .000,00	100 150.000 .000,00	100 150.000 .000,00	100 150.000 .000,00	100 150.000 .000,00	100 150.000 .000,00		
	Peningkatan Kompetensi Dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi	30	30 125.000 .000,00	60 125.000 .000,00	90 125.000 .000,00	100 150.000 .000,00	100 150.000 .000,00	100 150.000 .000,00	100 150.000 .000,00	100 150.000 .000,00	100 150.000 .000,00	100 150.000 .000,00	100 150.000 .000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	kualifikasi peningkat an	peningkatan															
<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>																	
<b>Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman</b>	<b>Persentas e Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehata n, Makanan dan Minuman</b>	<b>Jumlah fasilitas kesehatan yang menerima sediaan farmasi dan alkes sesuai kebutuhan dan standar/Tot al fasilitas kesehatan x 100%</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>250.000 .000,00</b>	<b>68</b>	<b>250.000 .000,00</b>	<b>78</b>	<b>350.000 .000,00</b>	<b>82</b>	<b>350.000 .000,00</b>	<b>86</b>	<b>350.000 .000,00</b>	<b>86</b>	<b>350.000 .000,00</b>		
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																	
Meningkatnya legalitas dan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan,	Persentase Tenaga Kesehatan yang memilki perizinan praktik	Jumlah sarana yang memiliki izin aktif/Total sarana yang beroperasi) x 100%	10	-	-	-	-	60	100.000 .000,00	70	100.000 .000,00	80	100.000 .000,00	80	100.000 .000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
dan obat tradisional dalam penyelenggaraan usahanya di wilayah kabupaten/kota	tenaga kesehatan																
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10	-	-	-	-	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT</i>																	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>																
	<i>Meningkatnya legalitas dan keamanan pangan produksi Industri Rumah Tangga (IRT) melalui kepemilikan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT</i>	<i>Persentase Sertifikat PIRT Yang di Terbitkan</i>	<i>Jumlah Sertifikat PIRT yang diterbitkan/j umlah Industri Pangan Rumah Tangga yang terdapat di kabupaten/k ota x 100%</i>	80	80	40.000. 000,00	80	40.000. 000,00	80	40.000. 000,00	85	40.000. 000,00	85	40.000. 000,00	85	40.000. 000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan	1	1	40.000. 000,00	1	40.000. 000,00	1	40.000. 000,00	1	40.000. 000,00	1	40.000. 000,00	1	40.000. 000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduks i oleh Industri Rumah Tangga	Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
	<i>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>																
	<i>Meningkatnya kepatuhan dan legalitas tempat pengelolaan makanan (TPM) terhadap</i>	<i>Persentase RPM dan Sentra Makanan Jajanan yang</i>	<i>Jumlah TPM dan Sentra Makanan Jajanan yang dilakukan</i>	80	80	60.000.000,00	80	60.000.000,00	80	60.000.000,00	85	60.000.000,00	85	60.000.000,00	85	60.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<i>standar higiene dan sanitasi sehingga mendukung penyediaan makanan dan minuman yang aman dan sehat bagi masyarakat</i>	<i>dilakukan pembinaan</i>	<i>pembinaan/ Jumlah Seluruh TPM dan Sentra Makanan x 100%</i>															
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	dan Depot Air Minum (DAM)																
<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>																	
<i>Meningkatnya keamanan dan mutu produk makanan dan minuman industri rumah tangga melalui pengawasan pasca pemasaran dan tindakan korektif terhadap temuan yang tidak memenuhi standar</i>	<i>Persentase Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Pangan Yang Diawasi</i>	<i>Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Pangan Yang Diawasi / Jumlah Sarana Produksi Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga x</i>	80	80	150.000.000,00	80	150.000.000,00	80	150.000.000,00	85	150.000.000,00	85	150.000.000,00	85	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTPUT	FORMULASI	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		100 %															
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Rumah Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	25	25	150.000.000,00	30	150.000.000,00	35	150.000.000,00	40	150.000.000,00	45	150.000.000,00	45	150.000.000,00		
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>																	
<b>Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</b>	<b>Persentase Masyarakat di Bidang Kesehatan yang</b>	<b>Jumlah masyarakat yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan</b>	<b>79,63</b>	<b>79,63</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>80</b>	<b>501.000.000,00</b>	<b>85</b>	<b>502.000.000,00</b>	<b>90</b>	<b>503.000.000,00</b>	<b>95</b>	<b>504.000.000,00</b>	<b>95</b>	<b>504.000.000,00</b>		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Diberdaya kan	an/Jumlah masyarakat sasaran x 100%														
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
	Meningkatnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat serta lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan di tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Peningkat an Strata Posyandu Aktif Dari Madya ke Pumama	Jumlah Posyandu aktif pumama/ Ju mlah Posyandu Madya x 100%	0	0	150.000 .000,00	5%	150.000 .000,00	5%	150.000 .000,00	5%	150.000 .000,00	5%	150.000 .000,00	5%	150.000 .000,00
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaa n Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan , Advokasi, Kemitraan dan Pemberdaya an Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdaya an Masyarakat	1	1	150.000 .000,00	1	150.000 .000,00	1	150.000 .000,00	1	150.000 .000,00	1	150.000 .000,00	1	150.000 .000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan perilaku hidup sehat dan penurunan risiko penyakit melalui pelaksanaan program promotif dan preventif di tingkat kabupaten/kota.	Persentase Rumah Tangga Ber - PHBS	Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS/Jumlah Rumah Tangga x 100%	90	90	250.000.000,00	90	251.000.000,00	95	252.000.000,00	95	253.000.000,00	100	254.000.000,00	100	254.000.000,00	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	1	100.000.000,00	1	101.000.000,00	1	102.000.000,00	1	103.000.000,00	1	104.000.000,00	1	104.000.000,00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	7302	7.302	150.000.000,00	7.667	150.000.000,00	8.050	150.000.000,00	8.453	150.000.000,00	8.876	150.000.000,00	8.876	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat													
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan mandiri dan promotif-preventif sehingga meningkatkan status	Persentase UKBM Aktif	Jumlah UKBM Aktif/ Jumlah UKBM x 100%	85	85	100.000.000,00	90	100.000.000,00	90	100.000.000,00	95	100.000.000,00	95	100.000.000,00	95	100.000.000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>kesehatan komunitas di tingkat kabupaten/kota</i>																
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
<b>Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan</b>																	
	<b>Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan</b>	<b>Persentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi</b>	<b>Jumlah fasyankes yang telah terakreditasi/Total fasyankes yang wajib diakreditasi x 100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>730.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>730.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>730.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>730.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>730.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>730.000.000,00</b>	
	<i>Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan</i>																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Meningkatnya jumlah puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah daerah yang terakreditasi sesuai standar nasional akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan	Jumlah puskesmas milik pemda yang terakreditasi / Total puskesmas milik pemda x 100%	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang terakreditasi	13	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00
Dukungan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain																	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kabupaten/Kota																	
Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang terakreditasi di wilayah kabupaten/kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Kabupaten /Kota	Jumlah fasyankes lain yang telah terakreditasi / Total fasyankes lain yang wajib akreditasi x 100%	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00
Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten / kota yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/kota yang terakreditasi	13	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00
Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Meningkatnya jumlah puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah daerah yang terakreditasi sesuai standar nasional akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan	Jumlah puskesmas pemda terakreditasi / Jumlah total puskesmas pemda x 100%	100	100	330.000.000,00	100	330.000.000,00	100	330.000.000,00	100	330.000.000,00	100	330.000.000,00	100	330.000.000,00	100	330.000.000,00
Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber dayayang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber dayayang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	13	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	10	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00		
<b>Program Pengendalian Penduduk</b>																	
	<b>Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk</b>	<b>Indeks advokasi dan pengendalian penduduk</b>	$\sum$ Skor seluruh sub-indikator /Sektor maksimal x 100	65,74	65,78	542.000.000,00	65,8	914.000.000,00	65,9	1.264.000.000,00	65,92	964.000.000,00	65,94	964.000.000,00	65,94	964.000.000,00	
		<b>Laju Pertumbuhan Penduduk</b>	(Angka Kelahiran - Angka Kematian) / Jumlah Penduduk Awal * 100%	1,36	1,36		1,46		1,56		1,66		1,76		1,76		
	<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk																
	Meningkatnya keselarasan kebijakan dan program pengendalian kuantitas penduduk antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Rancangan Rancangan Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan Rancangan Rancangan Kependudukan/ Jumlah OPD yang ditargetkan * 100%	100	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	650.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	-	-	-	-	1	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan													
	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	15	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		kepada Pemangku Kepentingan															
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Kependudukan, dan Keluarga Berencana )															
		<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>															
		<i>Tersedianya data dan informasi proyeksi pengendalian kuantitas penduduk yang akurat dan komprehensif di tingkat kabupaten/ kota untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif.</i>	<i>Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan</i>	<i>Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) / sektor yang ada x 100%</i>	100	100	192.000.000,00	100	564.000.000,00	100	614.000.000,00	100	614.000.000,00	100	614.000.000,00	100	614.000.000,00
		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan	1	-	-	1	84.000.000,00	1	84.000.000,00	1	84.000.000,00	1	84.000.000,00	1	84.000.000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	an	n Data Kependudukan	Data Kependudukan														
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	-	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1	-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	-	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00		
	Pencatatan dan Pengumpula	Jumlah Laporan Pencatatan	Jumlah Laporan Pencatatan	1	1	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	n Data Keluarga	n dan Pengumpulan Data Keluarga															
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	1	84.000.000,00	1	84.000.000,00	1	84.000.000,00	1	84.000.000,00	1	84.000.000,00	1	84.000.000,00		
	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga) di Sektor Lain yang dibentuk	12	-	-	22	100.000.000,00	32	150.000.000,00	42	150.000.000,00	54	150.000.000,00	54	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Berencana ) di Sektor Lain yang dibentuk															
	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	-	-	-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1	-	-	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	
	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan	-	-	-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Berencana (Bangga Kencana)	Pembangu nan Keluarga	an Keluarga														
<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>																
Meingkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalens i Kontrase psi Modern/ Modern Contrace ptive (mCPR)	Jumlah perempuan usia subur (15-49 tahun) yang menggunakan an kontrasepsi modern /Jumlah perempuan usia subur (15-49 tahun) yang menikah atau berpasanga n x 100%	67,2	67, 2	2.764.1 42.000, 00	67, 8	2.821.9 92.000, 00	68, 3	2.892.9 92.000, 00	68, 8	2.935.9 92.000, 00	69	2.848.3 92.000, 00	69	2.848.3 92.000, 00	
	Persentas e Kebutuha n Ber-KB yang Tidak Terpenuh i (Unmet Need)	Jumlah PUS yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan KB /Total PUS	3,1	3,1		2,8 5		2,7		2,6 5		2,5		2,5		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		x 100%														
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal															
	Meningkatnya pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian penduduk dan program Keluarga Berencana (KB) yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal	Persentase mitra kerja program KKBPK yang aktif dalam pengelolaa n pelayanan dan pembinaa n kesertaan ber- KB	Jumlah mitra kerja program KKBPK yang aktif /Jumlah mitra kerja program KKBPK yang sudah terbentuk x 100%	100	100	500.000 .000,00	100	500.000 .000,00	100	500.000 .000,00	100	500.000 .000,00	100	500.000 .000,00	100	500.000 .000,00
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendali an Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalia n Program KKBPK	1	1	25.000. 000,00	1	25.000. 000,00	1	25.000. 000,00	1	25.000. 000,00	1	25.000. 000,00	1	25.000. 000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	)																
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		ukan, dan Keluarga Berencana ) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan														
	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapat kan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana ) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatka n Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	90	90	200.000 .000,00	90	200.000 .000,00	90	200.000 .000,00	90	200.000 .000,00	90	200.000 .000,00	90	200.000 .000,00	
	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan efektivitas pendayagunaan tenaga penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB dalam mendukung program Keluarga Berencana di tingkat kabupaten/kota	Persentase IMP yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan oleh Petugas Lapangan KB	Jumlah IMP (Institusi masyarakat pedesaan) yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan/ Jumlah IMP (Institusimas yarakat pedesaan) yang ada x 100%	100	100	480.000.000,00	100	480.000.000,00	100	480.000.000,00	100	480.000.000,00	100	480.000.000,00	100	480.000.000,00	100	480.000.000,00
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	10	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	108	108	232.000.000,00	108	232.000.000,00	108	232.000.000,00	108	232.000.000,00	108	232.000.000,00	108	232.000.000,00	108	232.000.000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana /Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)															
	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota</i>																
	<i>Terpenuhinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi secara tepat waktu dan merata serta meningkatnya</i>	<i>Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi</i>	<i>(Peserta KB aktif modern / Pasangan Usia Subur ) x 100%</i>	37,95	37,5	1.238.542.000,00	37	1.245.992.000,00	36,5	1.255.992.000,00	36	1.265.992.000,00	35,5	1.150.992.000,00	35	1.150.992.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>cakupan dan kualitas pelayanan KB di wilayah kabupaten/kota</i>																
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	1	11.660.000,00	1	11.660.000,00	1	11.660.000,00	1	11.660.000,00	1	11.660.000,00	1	11.660.000,00		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1418	1.418	162.550.000,00	1.430	170.000.000,00	1.460	180.000.000,00	1.490	190.000.000,00	1.520	200.000.000,00	1.520	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan	7229	7229	150.000.000,00	7.240	150.000.000,00	7.300	150.000.000,00	7.325	150.000.000,00	7.350	150.000.000,00	7.350	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pelayanan bagi Peserta KB															
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	1	19.332.000,00	1	19.332.000,00	1	19.332.000,00	1	19.332.000,00	1	19.332.000,00	1	19.332.000,00		
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	20	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Reproduksi															
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	14	14	145.000.000,00	14	145.000.000,00	14	145.000.000,00	14	145.000.000,00	14	145.000.000,00	14	145.000.000,00	
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakatan Tingkat</i>															

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB																	
Meningkatnya peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pelayanan dan pembinaan peserta KB di tingkat kabupaten/ kota	Pemberda yaan dan Peningkat an Peran serta Organisasi Kemasyar akatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksana an Pelayanan dan Pembinaa n Kesertaan Ber- KB	Jumlah peran serta Organisasi Kemasyarak atan tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber- KB/ Jumlah Kecamatan yang ada x 100%	100	100	545.600 .000,00	100	596.000 .000,00	100	657.000 .000,00	100	690.000 .000,00	100	717.400 .000,00	100	717.400 .000,00		
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarak tan dan Mitra Kerja Lainnya dalam	Jumlah Organisasi yang Mendapat kan Penguatan Peran Serta	Jumlah Organisasi yang Mendapat kan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarak	54	54	150.000 .000,00	56	150.000 .000,00	58	155.000 .000,00	60	160.000 .000,00	62	165.000 .000,00	62	165.000 .000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB															
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di	Jumlah DASHAT di Kampung KB	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Kampung Keluarga Berkualitas																
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualita s yang mengikuti Pelaksana an dan Pengelolaa n Program Bangga Kencana (Pembang unan Keluarga, Kependud ukan, dan Keluarga Berencana )	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembang unan Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana)	26	26 145.600 .000,00	35	35 196.000 .000,00	45	45 252.000 .000,00	50	50 280.000 .000,00	54	54 302.400 .000,00	54	54 302.400 .000,00		
<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>																	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentas e Keluarga yang mengikut i Kelompok Kegiatan Ketahana	Jumlah keluarga KS Tahap II, III, dan KS /Jumlah total keluarga x 100%	81,5	81, 5 2.411.8 00.000, 00	82	82 2.869.8 00.000, 00	82, 5	82, 5 2.869.8 00.000, 00	83	83 2.869.8 00.000, 00	84	84 2.895.8 00.000, 00	84	84 2.895.8 00.000, 00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	n Keluarga																
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																
	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan aspek fisik, sosial, ekonomi, psikologis, dan spiritual secara terpadu	Persentase Kader BKB BKR, PPKA, PIK - RY yang diberi pelatihan dibagi Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R yang ada di kali 100%	65	65	1.594.0 00.000, 00	66,5	2.042.0 00.000, 00	67,5	2.042.0 00.000, 00	68	2.042.0 00.000, 00	68,5	2.042.0 00.000, 00	68,5	2.042.0 00.000, 00		
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbu han dan Peningkat an Kesadaran Keluarga dalam Keterlibat an	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbu han dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan	2782	2.78 2	150.000 .000,00	2.79 5	250.000 .000,00	2.80 0	250.000 .000,00	2.85 0	250.000 .000,00	2.90 0	250.000 .000,00	2.90 0	250.000 .000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Perencana an Kehidupa n Menuju Keluarga Berkualita s	Menuju Keluarga Berkualitas														
	Pembentuka n dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksana kan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Persentase sekolah lansia yang dilaksana kan di kelompok Bina Keluarga Lansia	1	1 150.000 .000,00	1	250.000 .000,00	1	250.000 .000,00	1	250.000 .000,00	1	250.000 .000,00	1	250.000 .000,00		
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaa n Ketahana n Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1	1 50.000. 000,00	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00		
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok	1	1 150.000 .000,00	1	150.000 .000,00	1	150.000 .000,00	1	150.000 .000,00	1	150.000 .000,00	1	150.000 .000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang tersedia	10	10	130.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		(UPPKA) yang tersedia															
	Orientasi/Pel atihan Teknis Pelaksana/K ader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana /Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberda yaan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkat an Pendapata n Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pe latihan Teknis Pelaksana/K ader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdaya an Ekonomi Keluarga/Us aha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	245	50 150.000 .000,00	50	150.000 .000,00	50	150.000 .000,00	50	150.000 .000,00	50	150.000 .000,00	50	150.000 .000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	22	22	75.000.000,00	22	85.000.000,00	22	85.000.000,00	22	85.000.000,00	22	85.000.000,00	22	85.000.000,00	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	201	202	232.000.000,00	202	250.000.000,00	202	250.000.000,00	202	250.000.000,00	202	250.000.000,00	202	250.000.000,00	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	201	202	232.000.000,00	202	250.000.000,00	202	250.000.000,00	202	250.000.000,00	202	250.000.000,00	202	250.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	1	25.000.000,00	1	57.000.000,00	1	57.000.000,00	1	57.000.000,00	1	57.000.000,00	1	57.000.000,00	
p	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan	3	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk														
	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>																
	<i>Meningkatnya partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembinaan ketahanan dan</i>	<i>Persentase Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas</i>	<i>Jumlah Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam</i>	100	100	732.800.000,00	100	732.800.000,00	100	732.800.000,00	100	732.800.000,00	100	740.000.000,00	100	740.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
kesejahteraan keluarga di tingkat kabupaten/kota.	dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) / Jumlah Mitra dan Organisasi x 100%	Pengelolaan Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) / Jumlah Mitra dan Organisasi x 100%															
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Keluarga/UP PKS)	aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberda yaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)															
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarak atan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UP PKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkat an Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyar akatan dalam Pengelolaa n Program Ketahana n dan Kesejahter aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdaya an Ekonomi Keluarga/UP PKS)	50	50	150.000 .000,00	50	150.000 .000,00	50	150.000 .000,00	50	150.000 .000,00	50	150.000 .000,00	50	150.000 .000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Keluarga/ UPPKS)															
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00		
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pegantin/C alon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahir an, Baduta/Balit	Cakupan Pemantau an Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pegantin/C alon PUS, Ibu Hamil, Pasca	1	1	174.000 .000,00	1	174.000 .000,00	1	174.000 .000,00	1	174.000 .000,00	1	180.000 .000,00	1	180.000 .000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
a)	Hamil, Pasca salin/kela hiran, Baduta/B alita)	salin/kelahir an, Baduta/Bali ta)															
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1	1	208.800.000,00	1	208.800.000,00	1	208.800.000,00	1	208.800.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00		
<i>Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)</i>																	
<i>Meningkatnya pengetahuan, sikap positif, dan kesiapan remaja dalam</i>	<i>Persentase remaja yang mengikuti kegiatan</i>	<i>Jumlah remaja aktif di PIK-R / Jumlah remaja</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>85.000.000,00</i>	<i>100</i>	<i>95.000.000,00</i>	<i>100</i>	<i>95.000.000,00</i>	<i>100</i>	<i>95.000.000,00</i>	<i>100</i>	<i>113.800.000,00</i>	<i>100</i>	<i>113.800.000,00</i>		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
merencanakan kehidupan berkeluarga secara sehat dan bertanggung jawab	PKBR melalui kelompok PIK-R aktif	sasaran x 100%															
Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencana an menikah (Penyiapa n Kehidupa n Berkeluar ga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencana an menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	1	1	50.000. 000,00	1	60.000. 000,00	1	60.000. 000,00	1	60.000. 000,00	1	78.800. 000,00	1	78.800. 000,00	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
<b>Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentas e Layanan Penunjan g Urusan pemerint ah daerah yang Terpenuhi</b>	<b>Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan *100%</b>		100	100	121.449 .209.76 6,00	100	122.959 .548.90 9,00	100	125.033 .135.30 0,00	100	127.117 .457.55 6,00	100	129.212 .623.03 4,00	100	130.318 .740.16 6,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total nilai persepsi responden per Unsur/ Total Unsur yang terisi * bobot	85,5	86		86,5		87		87,5		88		88,5		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu, akurat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun / Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah x 100%	100	100	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah tahapan yang sesuai dibagi jumlah	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Daerah	seluruh tahapan*100 % (Form E.68 Permendagri 86/2017-Renstra & Form E.70 Permendagri 86/2017-Renja)															
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah tahapan yang sesuai dibagi jumlah seluruh tahapan*100 %	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah tahapan yang sesuai dibagi jumlah seluruh tahapan*100 %	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>																
	<i>Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara</i>	<i>Persentase Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan</i>	<i>Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan melaksanakan</i>	100	100	96.921.948.035,00	100	101.793.449.895,00	100	102.804.301.394,00	100	103.815.211.408,00	100	104.841.280.522,00	100	105.877.610.327,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>	<i>melaksanakan administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan x 100%</i>													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	564	1026 95.045.333.035,00	1026	100.585.149.895,00	1026	101.596.001.394,00	1026	102.606.911.408,00	1026	103.632.980.522,00	1026	104.669.310.327,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium PPTK	12	12 1.876.615.000,00	12	1.208.300.000,00	12	1.208.300.000,00	12	1.208.300.000,00	12	1.208.300.000,00	12	1.208.300.000,00	
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>															
	Terlaksananya pengelolaan dan pencatatan administrasi administrasi Barang Milik Daerah secara tertib, akurat, dan sesuai	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan	100	100 80.000.000,00	100	40.000.000,00	28	40.000.000,00	28	40.000.000,00	28	40.000.000,00	28	40.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
peraturan perundang-undangan	akan Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah / Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan x 100%															
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15	15	30.000.000,00	13	20.000.000,00	13	20.000.000,00	13	20.000.000,00	13	20.000.000,00	13	20.000.000,00		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15	15	50.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00		
Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah																	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan dalam mendukung manajemen ASN di lingkungan perangkat daerah	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah / Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan x 100%	100	100	96.150.000,00	100	25.000.000,00	100	370.000.000,00	100	215.000.000,00	100	344.800.000,00	100	344.800.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15	-	-	-	5.000.000,00	15	200.000.000,00	-	-	1	4.800.000,00	1	4.800.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas pegawai yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	1	195.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolaha	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		n Administr asi Kepegawai an	Administrasi Kepegawai an														
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksana aan Sistem Informasi Kepegawai an	Jumlah DokumenHa sil Koordinasi dan Pelaksanaaa n Sistem Informasi Kepegawai an	15	-	-	-	1	150.000 .000,00	-	-	-	-	-	-		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitorin g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15	15	30.000. 000,00	15	20.000. 000,00	15	20.000. 000,00	15	20.000. 000,00	15	20.000. 000,00	15	20.000. 000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang telah ikut pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	6	20	66.150. 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang mencakup penyediaan bahan perkantoran, pelaksanaan rapat, aktivitas lapangan, pelayanan tamu, perjalanan dinas, dan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yangmelaksanakan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah / Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan x 100%	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah / Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan x 100%	100	100	4.073.024.000,00	100	2.455.326.400,00	100	2.186.914.159,00	100	2.455.326.400,00	100	2.399.622.764,00	100	2.399.622.764,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	15	15	300.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	15	15	600.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	15	15	750.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	15	15	1.323.024.000,00	15	1.455.326.400,00	15	1.186.914.159,00	15	1.455.326.400,00	15	1.399.622.764,00	15	1.399.622.764,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	15	15	500.000.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	15	600.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>																
	<i>Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah</i>	<i>Jumlah barang milik daerah yang diadakan/jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah*100 %</i>	100	100	300.000.000,00	100	843.707.590,00	100	843.707.590,00	100	843.707.590,00	100	843.707.590,00	100	843.707.590,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	3	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jabatan yang Disediakan															
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	15	5	100.000.000,00	5	643.707.590,00	5	643.707.590,00	5	643.707.590,00	5	643.707.590,00	5	643.707.590,00		
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersedianya layanan jasa administrasi perkantoran dan langganan operasional yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan akan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan x 100%	100	100	7.437.065.024,00	100	6.287.065.024,00	100	6.223.212.157,00	100	6.223.212.158,00	100	6.223.212.158,00	100	6.292.999.485,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	169.787.327,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	15	1.286.155.263,00	15	1.286.155.263,00	15	1.222.302.396,00	15	1.222.302.397,00	15	1.222.302.397,00	15	1.222.302.397,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediakan	15	15	450.000 .000,00	15	300.000 .000,00	15	300.000 .000,00	15	300.000 .000,00	15	300.000 .000,00	15	300.000 .000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12	12	5.600.9 09.761, 00	12	4.600.9 09.761, 00	12	4.600.9 09.761, 00	15	4.600.9 09.761, 00	12	4.600.9 09.761, 00	12	4.600.9 09.761, 00	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>																
	<i>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah agar tetap berfungsi dan dalam kondisi baik untuk</i>	<i>Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksan an Pemeliharaa</i>	<i>Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanak an Pemeliharaa</i>	100	100	1.603.8 00.000, 00	100	510.000 .000,00	100	560.000 .000,00	100	520.000 .000,00	100	515.000 .000,00	100	515.000 .000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah</i>	<i>akan Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan x 100%</i>													
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	15	150.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	15	15	300.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Lapangan	dan Perizinannya	Perizinannya														
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	15	15	300.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	15	15	110.250.000,00	15	50.000.000,00	15	100.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15	15	683.550.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/	3	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		yang Dipelihara /Direhabilitasi	Direhabilitasi														
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/d irehabilitasi	3	3	30.000. 000,00	3	30.000. 000,00	3	30.000. 000,00	3	40.000. 000,00	3	35.000. 000,00	3	35.000. 000,00	
	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>																
	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas layanan BLUD melalui penguatan tata kelola, sarana prasarana, SDM, manajemen keuangan, sistem informasi, serta penerapan standar pelayanan	Persentase UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD / Jumlah UPT Kesehatan x 100%	Jumlah UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD / Jumlah UPT Kesehatan x 100%	100	100	10.932. 222.707 ,00	100	11.000. 000.000 ,00	100	12.000. 000.000 ,00	100	13.000. 000.000 ,00	100	14.000. 000.000 ,00	100	14.000. 000.000 ,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMUL ASI	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13	10	10.932.222.707,00	13	11.000.000.000,00	13	12.000.000.000,00	13	13.000.000.000,00	13	14.000.000.000,00	13	14.000.000.000,00	
<b>Total</b>						<b>181.342.555.666,00</b>		<b>192.182.006.790,00</b>		<b>196.025.646.926,00</b>		<b>199.869.287.062,00</b>		<b>203.712.927.197,00</b>		<b>207.714.567.333,00</b>	

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tanggung jawab strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyelenggaraan urusan kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dalam menjalankan tugasnya, dinas telah berupaya untuk merealisasikan berbagai program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.

Di bidang kesehatan, kinerja penyelenggaraan terlihat dari peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Dinas berhasil mengembangkan pelayanan kesehatan primer dengan memperluas cakupan imunisasi, mengurangi angka kematian bayi dan ibu, serta memperkuat upaya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, penguatan fasilitas kesehatan melalui akreditasi puskesmas dan rumah sakit menjadi fokus utama dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan.

Pada urusan pengendalian penduduk, dinas telah melaksanakan program-program berbasis komunitas, seperti kampanye keluarga berencana (KB) yang berkelanjutan. Berkat peran aktif penyuluh dan edukasi masyarakat, kesadaran terhadap pentingnya pengendalian jumlah penduduk dan perencanaan keluarga terus meningkat. Hal ini diimbangi dengan pengembangan Kampung KB sebagai model pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi.

Di bidang keluarga berencana dan ketahanan keluarga, dinas mencatat kemajuan melalui peningkatan cakupan layanan konseling keluarga dan program pemberdayaan keluarga. Upaya ini difokuskan pada penurunan angka stunting dan gizi buruk, serta penguatan kapasitas keluarga dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Kinerja dinas juga didukung oleh penguatan tata kelola dan akuntabilitas program, termasuk melalui pengelolaan data dan informasi yang lebih baik. Dengan pendekatan berbasis teknologi,

pengawasan dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih efektif untuk memastikan setiap program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Melalui sinergi yang kuat dengan pemangku kepentingan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas mengampu pelaksanaan sejumlah program prioritas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029. Program - program tersebut dirancang untuk menjawab isu-isu strategis daerah, memperkuat pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Melalui peran ini, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas memastikan bahwa peningkatan kualitas dan akses kesehatan serta mewujudkan keluarga yang berkualitas dapat dilakukan dengan mendukung sejumlah program prioritas dalam mendukung program Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 seperti di bawah ini:

**Tabel. 4.2**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mndukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis SDM kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas di tingkat daerah	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rancangan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

**Tabel. 4.3 (Tabel T-C.28)**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Usia Harapan Hidup</b>	<b>Rata-rata jumlah Tahun yang diharapkan Seseorang Dapat Hidup</b>	<b>68,84</b>	<b>69,3</b>	<b>69,77</b>	<b>70,23</b>	<b>70,69</b>	<b>71,15</b>	
2	<b>Prevalensi Stunting</b>	<b>Persentase</b>	<b>13,3</b>	<b>12,5</b>	<b>12,3</b>	<b>11,8</b>	<b>11,3</b>	<b>11</b>	
3	Usia Harapan Hidup	Rata-rata jumlah Tahun yang diharapkan Seseorang Dapat Hidup	68,84	69,3	69,77	70,23	70,69	71,15	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Prevalensi Stunting	Persentase	13,3	12,5	12,3	11,8	11,3	11	
5	<b>Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)</b>	<b>Persentase</b>	<b>57,3</b>	<b>58,1</b>	<b>58,9</b>	<b>59,7</b>	<b>60,5</b>	<b>61,3</b>	
6	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rates/ ASFR 15-19)	Persentase	29,3	29,2	29	28,8	28,6	28	
7	Kehamilan Tidak direncanakan (KTD)	Persentase	28,3	27,3	26,7	25,9	24,4	23,6	
8	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Persentase	95,65	95,7	95,75	95,8	95,85	95,9	
9	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Persentase	56,1	57,5	58,2	59	60	61	
10	<b>Predikat AKIP</b>	<b>Persentase</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	
11	Nilai AKIP	Persentase	59,96	60,02	62,32	64,32	66,32	67,52	

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kualitas dan akses kesehatan sebagai mana tertuang pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas berperan penting dalam melaksanakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi bagian dari tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :

**Tabel. 4.4**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	1,3	1,26	1,22	1,18	1,14	1,1	
2	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,84	69,3	69,77	70,23	70,69	71,15	
3	Prevalensi Stunting	Persentase	13,3	12,5	12,3	11,8	11,3	11	
4	Angka Kematian Ibu	Kasus	0	0	0	0	0	0	
5	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persentase	55,48	58,44	61,4	64,37	65,36	67,33	
6	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persentase	78,5	79,87	81,23	82,59	83,05	84,05	
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase	98,74	98,8	98,85	98,91	98,93	98,97	
8	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	57,3	58,26	29,22	60,18	60,5	61,14	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,33	0,33	0,43	0,43	0,43	0,43	
10	Persenstase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	Persenstase	100	100	100	100	100	100	
11	Persenstase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase	100	100	100	100	100	100	
12	Persenstase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
13	Persenstase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase	100	100	100	100	100	100	
14	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sesuai standar								
18	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	
21	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	
22	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	
23	Angka Kematian Bayi (AKB)	Persentase	15	14,8	14,5	13	13,8	13,5	
24	Pemberian makanan tambahan untuk Ibu Hamil KEK	Persentase	85	86	87	89	91	92	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Pemberian Tablet Tambah Darah/Multipe Micronutrient Sipplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	Persentase	90	92	94	96	97	98	
26	Makanan bergizi seimbang pada Ibu Hamil	Persentase	80	82	84	86	88	90	
27	Pemeriksaan Kehamilan 6 kali selama masa kehamilan	Persentase	70	71	72	73	74	75	
28	Bayi Usia <6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Persentase	67	68	69	70	72	73	
29	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam	Persentase	71	72	74	76	78	80	
30	Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat ASI	Persentase	40	41	42	43	44	45	
31	Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk	Persentase	100	100	100	100	100	100	
32	Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	Persentase	80	81	82	83	84	85	
33	Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	Persentase	85	86	87	88	89	91	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Anak usia 0-23 bulan mendapat Imunisasi Rutin Lengkap	Persentase	95	95	95	95	95	95	
35	Anak usia 6-23 bulan diare mendapatkan oralt dan zinc sesuai standar	Orang	8	8	9	9	10	10	
36	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)	Orang	376	376	376	376	376	376	
37	Anak usia 24-59 bulan mendapatkan tata laksana gizi buruk	Persentase	100	100	100	100	100	100	
38	Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan	Persentase	80	81	82	83	84	85	
39	Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persentase	85	86	87	88	89	91	
40	Anak usia 24-59 bulan diare mendapatkan oralt dan zinc sesuai standar	Orang	4	4	4	5	5	5	
41	Anak usia 24-59 bulan ipantau kasus pneumonia	Orang	36	36	36	36	36	36	
42	Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)	Orang	2629	2629	2629	2629	2629	2629	
43	Persentase pemakaian kontrasepsi moderen ( Moderen Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase	67,2	67,8	68,3	68,8	69	69,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( Unmet Need)	Persentase	3,1	2,85	2,7	2,65	2,5	2,4	
45	Indeks Lansia Berdaya	Persentase	55	55,5	56	56,5	57	57,5	
46	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	10	20	30	40	50	60	
47	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	Persentase	82	84	86	88	90	92	

## **BAB V**

### **PENUTUP**


Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan mencerminkan semangat dan tanggung jawab dinas dalam mendukung tercapainya visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk yang terencana, dan penguatan ketahanan keluarga. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, dinas optimis dapat menjawab tantangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara holistik.

Semoga program dan kebijakan yang telah dirumuskan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari peran serta semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra pembangunan. Dengan semangat kebersamaan dan kerja sama, mari kita wujudkan masa depan yang lebih baik, di mana setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak, keluarga yang sejahtera, dan lingkungan yang mendukung kualitas hidup.

Tarempa, 15 September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA



  
MESSY ARIESSANDY, S.Farm, Apt., M.H.Kes  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19810418 200604 2 019